

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Signifikasi Penelitian

Kehidupan yang layak merupakan salah satu hak yang harus dimiliki setiap rakyat Indonesia sesuai yang diatur dalam UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kepemilikan tempat tinggal yang layak merupakan salah satu dari instrumen kehidupan yang layak. Rumah layak huni juga sangat penting bagi pembangunan kesehatan, pendidikan, dan taraf ekonomi keluarga. Bahkan, rumah menjadi satu cara paling kuat untuk mengurangi indikator kemiskinan suatu bangsa. Kondisi permukiman berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin rendah kesejahteraan penduduk maka semakin rendah pula kondisi permukiman yang mereka diami (Maslow dalam Hariyono. 2007). Rendahnya kualitas permukiman dikarenakan masyarakat berpenghasilan rendah tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya dalam memenuhi kebutuhan hidup serta kurangnya kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah dalam memelihara serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang mereka diami. Hal ini mengakibatkan munculnya permasalahan perumahan dan permukiman.

Hingga kini Indonesia masih menghadapi masalah kekurangan kebutuhan (*backlog*) perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini terjadi karena terus bertambahnya penduduk di Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dikutip dari *sindonews.com*, pada 2017 menyatakan, saat ini masih ada sebesar 3,4 juta rumah yang tidak layak huni. Pemukiman layak huni adalah lingkungan hidup di luar kawasan lindung, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dengan penataan sesuai dengan standar

dan tata ruang yang berlaku serta menjamin kesehatan masyarakat. Perumahan yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat kesehatan sehingga penghuninya tetap sehat. Perumahan yang sehat tidak lepas dari ketersediaan prasarana dan sarana yang terkait, seperti penyediaan air bersih, sanitasi pembuangan sampah, transportasi, dan tersedianya pelayanan sosial.

Sebagai contoh, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Data BPS terbitan tahun 2016 mencatat penduduk di DKI Jakarta mencapai 15.328 jiwa per kilometer persegi (km²). Hal itu menyebabkan tingginya permintaan akan bangunan tempat tinggal yang kemudian berimbas pada mahalannya harga rumah. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, pada wawancara dengan *republika.com* mengatakan sebanyak 48,91 persen penduduk Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta tidak mempunyai bangunan atau rumah atau tempat tinggal milik sendiri. Kalau penduduk Jakarta berjumlah 10 juta, berarti terdapat 4,89 juta warga yang mengontrak atau menyewa tempat tinggal orang lain untuk dijadikan hunian. World Health Organization (WHO) memiliki standar rumah layak dengan luas 10 m² per orang atau dengan total 40 m². Rumah yang layak paling tidak harus memiliki fasilitas-fasilitas seperti Penyediaan air bersih yang cukup, adanya tempat pembuangan tinja, tersedianya pembuangan air limbah (air bekas), pembuangan sampah, fasilitas dapur, dan ruang berkumpul keluarga.

Penyediaan rumah menjadi salah satu bagian penting dalam majunya sebuah negara. Rumah menjadi pilar tumbuh kembangnya keluarga yang baik dari sisi kesejahteraan, kesehatan hingga aspek sosial. Intervensi pemerintah dalam pembangunan perumahan layak bagi masyarakat memang harus ditingkatkan lagi. Perlu peran segala aspek pemerintahan dari pusat hingga ke daerah untuk menyelesaikan permasalahan sosial ini. Peran aktif pemerintah daerah dalam hal perizinan dan penetapan ruang, pengembang untuk meningkatkan pembangunan

rumah dengan harga yang terjangkau serta masyarakat itu sendiri untuk membangun rumah yang layak huni secara swadaya.

Kolaborasi antara pemerintah, perbankan, *developer* hingga akademisi dalam rangka menyediakan perumahan kepada masyarakat berbasis pembiayaan kolektif untuk mewujudkan pembangunan perumahan yang berkelanjutan.

Demi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, aman, tenteram, rukun, damai, bahagia, dan sejahtera. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Organisasi masyarakat merupakan salah satu contoh bentuk dan juga upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu yang sengaja berkumpul dan membentuk organisasi, untuk berbagai tujuan. Membantu masyarakat yang mengalami kesulitan secara sosial, ekonomi dan sebagainya sebagai wujud dari bela Negara dan membangun bangsa.

Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini terjadi sejak seseorang lahir, tumbuh dewasa serta dalam upayanya mencari penghidupan. Bela Negara dapat dilakukan tidak sebatas secara fisik namun dapat dilakukan secara non fisik, pembelaan negara secara non fisik diartikan sebagai semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Nasionalisme adalah rangkaian kecintaan dan kesadaran dalam proses berkehidupan dalam negara dan bangsa, serta upaya untuk menumbuhkan rasa cinta pada tanah air.

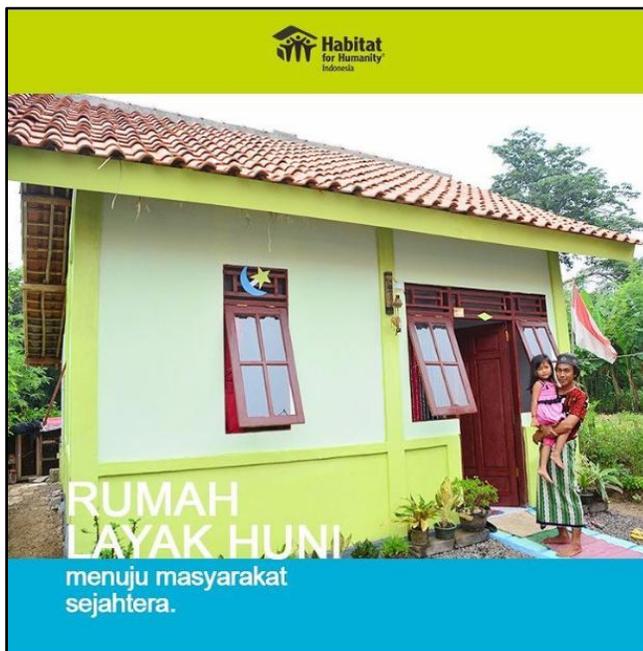
Berkaitan dengan pentingnya ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, mendorong beberapa lembaga non-pemerintah untuk ikut bergerak dalam kegiatan ini. Salah satu lembaga non-pemerintah tersebut adalah Habitat for Humanity Indonesia. Habitat for Humanity Indonesia merupakan bagian dari Habitat for Humanity International, sebuah lembaga nirlaba yang bertujuan untuk membantu pembangunan atau perbaikan rumah tinggal sehingga menjadi

hunian yang layak, sederhana, dan terjangkau untuk keluarga berpenghasilan rendah. Didirikan oleh Millard dan Linda Fuller, Habitat for Humanity berpusat di Atlanta, Amerika Serikat. Hingga saat ini, Habitat for Humanity telah ada di lebih dari 70 negara. Habitat for Humanity Indonesia telah membantu lebih dari 52.912 keluarga, dengan pembangunan rumah baru, renovasi rumah lama, penyediaan air bersih dan toilet publik, serta pembangunan fasilitas komunitas.

Habitat for Humanity Indonesia ikut mendorong warga binaan untuk terus menghayati dan melestarikan gotong royong, dengan dibantu komite desa. Anggota komite desa adalah orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi dalam memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk karya-karya HFH Indonesia di masyarakat. Komite desa ini menggerakkan warga untuk gotong royong dalam membantu warga yang rumahnya akan dibangun, pembangunan jalan, ataupun MCK komunal. Mereka melakukannya bersama-sama, dengan semangat kebersamaan dan persaudaraan.

Bagi Habitat for Humanity Indonesia, rumah adalah awal dari kehidupan keluarga dan sarana membangun bangsa. Rumah layak huni adalah hak asasi manusia. Setiap orang berhak untuk tinggal di rumah yang layak. Rumah layak huni juga sangat penting bagi pembangunan kesehatan, pendidikan, dan taraf ekonomi keluarga. Bahkan, rumah menjadi satu cara paling kuat untuk mengurangi indikator kemiskinan suatu bangsa. Keluarga membutuhkan air bersih. Untuk keperluan memasak makanan dan minuman, mandi, serta mencuci. Keluarga membutuhkan sanitasi, sehingga kotoran bisa jauh dari jangkauan kontak manusia dan tidak menjadi sarana penyebaran bibit penyakit. Anak-anak membutuhkan tempat belajar, pendidikan di rumah adalah kunci penting bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang cerah. Keluarga membutuhkan pengembangan taraf ekonomi. Banyak bisnis besar berawal dari skala rumah tangga dan keluarga bisa memperoleh tambahan penghasilan.

Melalui program-program yang dijalankan, Habitat for Humanity Indonesia mengajak semua pihak baik individu, kelompok, segenap lembaga dan perusahaan untuk berpartisipasi aktif dan nyata dengan mendukung program-program Habitat for Humanity Indonesia membangun rumah layak huni bagi keluarga-keluarga berpenghasilan rendah. Melalui program utama membangun rumah layak huni, Habitat for Humanity Indonesia bermaksud mendukung program pemerintah “100-0-100”, khususnya untuk mengurangi daerah kumuh atau rumah tidak layak huni di Indonesia. Maka pembangunan perumahan-perumahan Habitat for Humanity Indonesia dapat memberi efek domino berupa solusi atasi pengangguran karena bisa menyerap banyak tenaga kerja dalam program tersebut. Dengan sikap bela negara terhadap bangsa Indonesia menjadi kekuatan negara Indonesia bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional dan merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian program nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses.



Gambar 1.1 Salah Satu *Home Partner* Penerima Benefit Program



Gambar 1.2. Program 100-0-100

Dalam menjalankan program “Membangun Rumah” seperti yang dilakukan Habitat for Humanity Indonesia, peran pelaksana komunikasi dalam hal menyampaikan pesan yang ingin dimaksud ke target khalayak sangat penting. Keseimbangan pertukaran informasi antar anggota kelompok, kualitas pemahaman makna bersama atas ide-ide yang muncul dari setiap pelaksana komunikasi juga harus diperhatikan. Dari sini peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“KOMUNIKASI LINGKUNGAN DALAM PROGRAM “MEMBANGUN RUMAH” HABITAT FOR HUMANITY INDONESIA SEBAGAI SARANA MEMBANGUN BANGSA. (STUDI KASUS : PADA PROGRAM “MEMBANGUN RUMAH” DI DESA BOJONG KONENG, SENTUL, JAWA BARAT).”**

1.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya berfokus pada tahapan yang ada dalam Komunikasi Lingkungan dalam Program “Membangun Rumah” Habitat for Humanity Indonesia di Desa Bojong Koneng, Sentul, Jawa Barat.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan penjabaran permasalahan diatas, maka disimpulkan bahwa pertanyaan penelitian yang akan dibahas adalah:

1. Mengapa komunikasi lingkungan yang dilakukan Habitat for Humanity Indonesia dalam program “Membangun Rumah” dapat menjadi Sarana Membangun Bangsa?
2. Bagaimana tahapan dalam komunikasi lingkungan yang dilakukan Habitat for Humanity Indonesia dalam program “Membangun Rumah” sebagai Sarana Membangun Bangsa?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Menjelaskan alasan komunikasi lingkungan yang dilakukan Habitat for Humanity Indonesia dalam program “Membangun Rumah” dapat menjadi Sarana Membangun Bangsa.
2. Menjelaskan bagaimana komunikasi lingkungan yang dilakukan Habitat for Humanity Indonesia dalam program “Membangun Rumah” sebagai Sarana Membangun Bangsa.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.) Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu menjadi sumbangan akademis bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya bidang *Public Relations*.

2.) Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan mampu menjadi masukan bagi Habitat for Humanity Indonesia dalam menentukan strategi program kedepannya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini berisi mengenai latar belakang, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai penelitian-penelitian terdahulu, konsep-konsep penelitian, teori penelitian, serta kerangka berfikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini terdapat metode pengumpulan data, penentuan *key informan* dan informan, teknik analisis data, teknik keabsahan data, serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai deskripsi objek penelitian, hasil penelitian, serta pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian, serta saran yang dapat diberikan oleh penulis.

